

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adams, Wahiduddin. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Adji, Indruyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta, Diadit Media, 2009.
- Agustina, Shinta. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, LeIP, 2016.
- Alamsah, Nandang Alamsah, and Sigid Suseno. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Banten, Universitas Terbuka, 2017.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Djaja, Ermansjah. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006,*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Fairbank, John K. *East Asia Tradition and Transformation*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1973.
- Global Legal Insights. *Bribery & Corruption Laws and Regulations*. London, Global Legal Insights, 2023.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ismail, Maqdir, et al. *Meneliti Vonis Eks Mensos Juliari dalam Kasus Korupsi Bansos*. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021.

- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, PT Alumni, 2007.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Parellangi, Andi. *Modul Pendidikan Budaya Antikorupsi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta, Kementerian Kesehatan, 2020.
- Wang, Linjin. *Punishment of Public Corruption in China and the United States*. Indiana, West Lafayette, 2018.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Yuntho, Emerson. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2017



Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Junaidi. "Tugas dan Wwenang Lembaga-lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Kudus: Yudisia Research Center*, vol. 5, no. 1, 2014.
- Anjari, W. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 49, no. 4, 2020.
- Cao, Xiaping, et al. "Anti-corruption Campaigns and Corporate Information Release in China." *Journal of Corporate Finance*, vol. 49, 2018.
- Darini, Ririn. "Korupsi di China: Perspektif Sejarah." *Ilmu Sejarah FISE UNY*, vol. 37, no. 1, 2011.

- Hardianti, Ayu Fitri. "Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara Cina." *Universitas Islam Bandung*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Jurnal Hukum*, vol. IX, no. 3, 2017.
- Khairandy, Ridwan. "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara." *Jurnal Hukum*, vol. 16, no. 1, 2009.
- Makaruku, Steven. "Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan China." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, vol. 22, no. 1, 2016.
- Mochtar, Ainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 2, 2021.
- Olivia, Gina. "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China." *Varia Hukum*, vol. 3, no. 1, 2021.
- Putri, Kristina Dwi, and Agustianto. "Efektifitas Penerapan Hukuman Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4, no. 3, 2021.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 3, 2018, pp. 254-260.
- Suwitri, Sri. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 1, 2007.

Website

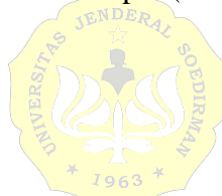
Corruption Perceptions Index 2022.” *Transparency International*,

<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index->. Diakses pada 27 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)



Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (PERPRES No. 54 Tahun 2018)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (TAP MPR No. XI Tahun 1998)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999)

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002)

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19 Tahun 2019)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Ppenghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 71 Tahun 2000)



Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERPRES No. 102 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi (PERMENRISTEKDIKTI No. 33 Tahun 2019)

Civil Code of the People's Republic of China (KUHP China)